

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan perkembangan pola berpikir masyarakat sebagai salah satu dampak pembangunan pendidikan adalah munculnya pemikiran dalam sistem pemerintahan Negara untuk memberikan otonomi yang lebih luas kepada daerah dalam mengembangkan pembangunan sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Hal ini melahirkan Undang-Undang nomor 32 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang nomor 33 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang kemudian disusul dengan Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2005 Tentang Pembagian Wewenang antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam kerangka Otonomi Daerah. Undang-Undang dan peraturan ini konsekuensi terhadap kewenangan daerah sehingga lebih otonom termasuk pendidikan, karena bidang pendidikan merupakan salah satu kewenangan pusat yang pelaksanaannya diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000.

Pemberian otonomi yang lebih luas kepada daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) dalam pembangunan dan pemerintahan memunculkan gagasan untuk mengembangkan desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan nasional. Sudah saatnya daerah-daerah secara

bertahap diberi kewenangan dan kepercayaan yang lebih luas dalam mengelola dan mengembangkan program-program pembangunan pendidikan nasional sesuai dengan potensi, kebutuhan, dan kepentingan masing-masing daerah dan kepentingan nasional.

Otonomi ini dimaksudkan agar sekolah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Pelibatan masyarakat dimaksudkan agar mereka lebih memahami, membantu, dan mengontrol pengelolaan pendidikan. Otonomi dalam manajemen merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja para staf, menawarkan partisipasi langsung kekelompok-kelompok terkait, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan. Sejalan dengan semangat desentralisasi serta otonomi dalam bidang pendidikan, kewenangan sekolah juga berperan dalam menampung konsensus umum yang meyakini bahwa sedapat mungkin keputusan seharusnya dibuat oleh mereka yang memiliki akses paling baik terhadap informasi setempat, yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan yang terkena akibat kebijakan tersebut.

Kepemimpinan berkaitan dengan masalah kepala sekolah dalam meningkatkan kesempatan untuk mengadakan pertemuan secara efektif dengan para guru, *stakeholders*, orang tua peserta didik, dan masyarakat pada umumnya dalam situasi yang kondusif dan meningkatkan kerja sama dengan berbagai komponen masyarakat. Dalam hal ini berkaitan dengan tingkat

partisipasi masyarakat dimana sekolah itu berdiri sehingga dapat mendukung sistem persekolahan yang ada.

Kepemimpinan merupakan inti dari manajemen, menurut Sondang P. Siagian (1985: 6) karena kepemimpinan merupakan motor penggerak dari semua sumber-sumber dan alat-alat (*resources*) yang tersedia bagi suatu organisasi. Tugas dasar pemimpin adalah membentuk dan memelihara lingkungan dimana manusia bekerjasama dalam suatu kelompok yang terorganisir dengan baik, menyelesaikan tugas mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan merupakan aktivitas manajerial yang penting di dalam setiap organisasi khususnya dalam pengambilan kebijakan dan keputusan sebagai inti dari kepemimpinan.

Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang yang diarahkan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Isu penting kepemimpinan pendidikan adalah berkisar pada tipe dan gaya kepemimpinan yang mana yang paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan lembaga. Karena menurut Max Weber dalam Syaiful Sagala (2000: 150) dikenal adanya tipe-tipe kepemimpinan yang didasari tradisi turun temurun, kharismatik atau wibawa disebabkan karakteristik pribadi yang istimewa dan aturan main yang rasional, atau campuran antara ketiga tersebut. Seorang pemimpin antara yang satu dengan yang lain berbeda baik pengalaman, pendidikan, kondisi lingkungan, pribadi, dan sebagainya. Karena itu situasi dalam menetapkan dan menentukan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi terutama dalam konteks pengambilan

keputusan adalah menjadi penting melihat situasi dimana kepemimpinan itu berlangsung.

Kunci penting gaya kepemimpinan dalam institusi satuan pendidikan adalah memahami kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan khusus dari setiap personel organisasi dalam situasi yang ada. Kebutuhan dan keinginan setiap personel ini adalah untuk memenuhi strategi pencapaian target dan tujuan organisasi, bukan kebutuhan dan keinginan yang bersifat pribadi, karena kebutuhan dan keinginan tersebut untuk organisasi, maka pemimpin harus memenuhinya.

Kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk peran sertanya terhadap pendidikan nasional tidak berbentuk fisik material saja, tetapi banyak bentuk dan kualifikasi peran serta masyarakat yang dapat disumbangkan kepada pendidikan. Peran serta masyarakat dalam pendidikan menurut Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1995 Pasal 4 dapat berbentuk :

1. Pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan pada jalur pendidikan sekolah atau luar sekolah. Semua jenis pendidikan kedinasan dan semua jenjang pendidikan di jalur pendidikan sekolah.
2. Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga pendidikan
3. Pengadaan tenaga ahli
4. Pengadaan dan atau penyelenggaraan program pendidikan yang belum diadakan dan atau diselenggarakan oleh pemerintah
5. Pengadaan dana dan pemberian bantuan yang dapat berupa wakaf, hibah, sumbangan, pinjaman, beasiswa, dan sejenisnya.
6. Pengadaan dan pemberian bantuan ruang, gedung, dan tanah untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.
7. Pengadaan dan pemberian bantuan buku pelajaran dan peralatan pendidikan
8. Pemberian kesempatan untuk magang dan latihan kerja
9. Pemberian bantuan manajemen
10. Pemberian pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan dan atau penyelenggaraan pengembangan pendidikan

11. Pemberian bantuan dan kerjasama dalam kegiatan penelitian serta pengembangannya
12. Keikutsertaan dalam program pendidikan dan atau penelitian.

Made Pidarta (1998:199) beberapa contoh bentuk peran serta masyarakat

dalam pendidikan :

1. Mengawasi perkembangan pribadi dan proses belajar putranya di rumah dan bila perlu memberi laporan/konsultasi ke lembaga pendidikan
2. Menyediakan fasilitas belajar di rumah dan membimbing putranya agar giat belajar
3. Menyediakan perlengkapan belajar yang dibutuhkan untuk belajar di lembaga pendidikan
4. Berusaha melunasi SPP dan dana bantuan pendidikan lainnya
5. Memberikan umpan balik kepada lembaga pendidikan tentang pendidikan terutama yang menyangkut putra putrinya
6. Bersedia datang ke lembaga pendidikan bila diundang
7. Ikut berdiskusi memecahkan masalah pendidikan seperti keuangan, sarana, kegiatan dan sebagainya.
8. Membantu fasilitas-fasilitas belajar yang dibutuhkan lembaga dalam memajukan proses belajar
9. Meminjami perlengkapan pertukangan, perkembangan kesenian, dan sebagainya yang diberikan oleh lembaga.
10. Bersedia menjadi tenaga pelatih dan narasumber bila ditunjuk
11. Menerima para siswa dengan senang hati bila mereka belajar di masyarakat
12. Memberikan layanan atau penjelasan kepada para pelajar yang belajar di masyarakat
13. Menjadi responden yang baik terhadap penelitian-penelitian siswa dan lembaga
14. Memberi bantuan penginapan bagi para siswa dan mahasiswa yang praktek di masyarakat
15. Bersedia menjadi ekspert dalam membina lembaga pendidikan
16. Bagi para hartawan bersedia memberikan bantuan dana secara cuma-cuma
17. Ikut memperlancar komunikasi pendidikan di masyarakat dalam bentuk penerbitan-penerbitan, siaran-siaran radio, televisi, pertunjukkan dan sebagainya
18. Mengajukan usul-usul atau perbaikan pendidikan
19. Ikut mengontrol jalannya pendidikan
20. Bagi tokoh-tokoh masyarakat bersedia menjadi partner manajer pendidikan dalam mempertahankan dan memajukan lembaga
21. Ikut memikirkan dan merealisasikan kesejahteraan personalia pendidikan

Bentuk peran serta masyarakat tersebut sangat dibutuhkan oleh dunia pendidikan sehingga pemerintah tidak sendiri dalam mengimplementasikan seluruh program pendidikan. Dengan peran serta yang diberikan oleh masyarakat, pemerintah akan memiliki partner yang mendukung keberhasilan program terutama pelaksanaan program di lapangan yang tentunya akan menghadapi banyak hambatan dan tantangan. Begitu pun sebaliknya sekolah sebagai lembaga sosial yang diselenggarakan dan dimiliki oleh masyarakat harus memenuhi kebutuhan masyarakatnya, dan memiliki kewajiban untuk memberikan penerangan kepada masyarakat tentang tujuan-tujuan, program-program, kebutuhan dan keadaanya.

Kemampuan untuk menjalin hubungan yang baik dan penuh pengertian antara sekolah dan masyarakat merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap personil sekolah terutama kepala sekolah selaku pimpinan. Dengan partisipasi masyarakat yang tinggi maka sekolah dapat berjalan dengan baik, maka dari itu dengan kepemimpinannya seorang kepala sekolah harus fleksibel dan intens dalam melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat. Dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi juga, maka kepemimpinan kepala sekolah dapat dikatakan berhasil. Selain itu juga dengan ditunjang adanya program sekolah yang berkualitas akan meningkatkan kinerja sekolah menjadi lebih baik.

Berbeda halnya jika sekolah tersebut berada di daerah perkotaan yang tingkat pendidikan masyarakatnya cukup tinggi maka tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikannya pun secara tidak langsung akan tinggi

pula, sedangkan sekolah yang berada di lingkungan pedesaan dan dapat dikatakan sebagai daerah tertinggal atau terpencil maka hal tersebut akan sulit sekali untuk dicapai. Oleh karena itu dibutuhkan kepemimpinan kepala sekolah yang mengerti dan paham akan situasi dan kondisi serta karakteristik lingkungan baik internal (sekolah) dan eksternal (Masyarakat) di mana sekolah itu berdiri.

Selama ini pandangan masyarakat mengatakan bahwa sebuah daerah dikatakan terpencil atau tertinggal bila berada di atas pegunungan dan berjarak sangat jauh dari perkotaan disertai lokasi sekolah yang tersebar diberbagai karakteristik wilayah di Indonesia mempunyai karakteristik sebagai berikut, 1) Letak geografis, jarak dari sekolah ke kota kecamatan ± 30 km, melalui jalan setapak dan berbatu serta disebelahnya jurang yang curam, berada di atas gunung dengan ketinggian $\pm 700-900$ dpl, berada didaerah pedalaman, atau berada di kepulauan terluar, 2) Karakteristik masyarakat yang cenderung homogen dengan mata pencaharian bertani, masih memegang teguh adat istiadat dan kepercayaan, sulit menerima kebudayaan luar/asing/hal-hal yang bersifat baru, rasa kekeluargaan dan gotong-royong masih tinggi, cara berpikir yang kolot, stratifikasi sosial yang tinggi, hukum yang berlaku tidak tertulis, dan ketergantungan pada lingkungan alam sekitar 3) Hanya ada satu sekolah (sekolah dasar) dengan peserta didik dari berbagai kampung yang terbagi dari beberapa desa dan kecamatan, 4) Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah, dapat dilihat dari mayoritas penduduknya 70% buta huruf.

Masyarakat yang tinggal di daerah tertinggal/terpencil adalah masyarakat yang mempunyai sistem ekonomi sederhana yang lebih banyak dikuasai oleh adat istiadat lama. Masyarakat di daerah ini didasarkan pada cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan yang diwariskan dari nenek moyangnya. Kehidupan mereka belum terlalu dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang berasal dari luar lingkungan sosial, dan hidup di daerah yang terletak di pedalaman yang secara geografis jauh dari keramaian kota, berhubungan erat satu sama lain, dengan sifat-sifat yang hampir seragam. Secara sosiologis memberikan penekanan pada kesatuan masyarakat pertanian, lingkungan alam hijau, dikelilingi pegunungan lembah dan hutan belum sepenuhnya digarap manusia.

Melihat berbagai karakteristik dan kondisi dari desa tertinggal/terpencil tersebut maka akan menjadi suatu tantangan nyata dari kepemimpinan kepala sekolah di desa terpencil yang diantaranya adalah, 1) Pola pikir masyarakat yang kolot, maka pendidikan belum menjadi suatu kebutuhan primer karena latar pendidikan masyarakat masih rendah (awam pendidikan), 2) Penghasilan masyarakat rendah sehingga sekolah dianggap sesuatu yang mahal dan merugikan karena harus mengeluarkan uang yang banyak dan dengan sekolah peserta didik tidak menghasilkan uang dan hanya buang-buang tenaga, 3) Jarak sekolah dengan rumah peserta didik tersebar dengan melalui jalan setapak yang terjal dan hutan perdu serta memakan waktu paling cepat 30 menit sehingga peserta didik harus berangkat pagi-pagi sekali.

Melihat kondisi tersebut maka kepala sekolah dengan kepemimpinannya harus mencari jalan keluar dari permasalahan itu agar sistem pendidikan di sekolah dasar terpencil tetap berjalan dengan baik dan pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup masyarakatnya serta yang paling penting adalah pemerataan akses pendidikan keseluruhan wilayah di Indonesia termasuk desa terpencil/tertinggal atau berada di pedalaman sekalipun. Oleh karena itu dibutuhkan dukungan atau partisipasi masyarakat yang peduli terhadap pendidikan dalam prosesnya. Dengan melihat berbagai karakteristik masyarakat pedesaan atau yang tinggal di daerah terpencil maka hal pertama yang harus dilakukan oleh kepala sekolah adalah dengan melakukan pendekatan-pendekatan terhadap para pemimpin kampung atau tetua adat dan tokoh masyarakat berupa pemberian penyuluhan tentang arti penting pendidikan, mendatangi setiap rumah penduduk untuk memberi pengarahan dan pembinaan. Untuk menunjang hal tersebut maka di dalam kepemimpinannya kepala sekolah harus mempunyai kompetensi-kompetensi baik profesional, personal, sosial, maupun manajerial, dan harus komunikatif, kreatif dan inovatif, memiliki karakteristik yang kuat, memiliki skill (*technical skill, conceptual skill, kontekstual skill, dan human relation*) serta berwawasan luas.

Berdasarkan uraian di atas perlu kiranya ada suatu kajian yang mengarah kepada kepemimpinan kepala sekolah di desa terpencil. Pengkajian tersebut di pandang perlu untuk mendapatkan salah satu kajian deskriptif analisis yang titik beratnya pada aspek peningkatan partisipasi masyarakat dalam

pendidikan. Maka judul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
“Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Sekolah Dasar Terpencil Desa Pakuncen Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang-Banten”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi partisipasi masyarakat di Sekolah Dasar Terpencil?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat di Sekolah Dasar Terpencil?
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Sekolah Dasar Terpencil?
4. Perubahan apa saja yang terjadi dalam peningkatan partisipasi masyarakat?
5. Hambatan atau kendala apa saja yang dihadapi kepala sekolah dalam peningkatan partisipasi masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Secara umum penelitian bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang menggambarkan bagaimana kepemimpinan kepala sekolah dalam upaya peningkatan tingkat partisipasi masyarakat.

2. Tujuan khusus

- a. Mengetahui dan mengamati kondisi partisipasi masyarakat di Sekolah Dasar terpencil
- b. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yang letak geografisnya di daerah terpencil
- c. Menemukan Upaya kepala sekolah dalam peningkatan partisipasi masyarakat di Sekolah Dasar Terpencil
- d. Melihat dan mengamati Perubahan-perubahan yang terjadi dalam peningkatan partisipasi masyarakat
- e. Memahami Hambatan atau kendala yang dihadapi kepala sekolah dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat

D. Anggapan Dasar

Anggapan dasar merupakan titik tolak dalam mengembangkan pemikiran mengenai permasalahan yang akan diteliti yang mengarah kepada solusi permasalahan dan memberikan asumsi yang kuat mengenai permasalahan. Oleh karena itu penulis perlu menetapkan beberapa anggapan dasar, yang dimaksudkan untuk memberikan hakikat, bentuk dan arah argumentasi terhadap masalah sehingga dapat terhindari dari penyimpangan-penyimpangan pada saat pembahasan nanti.

Sebagaimana seperti yang dikemukakan oleh Winarno Surakhmad (Suharsimi Arikunto, 1997: 58) bahwa “ Anggapan dasar atau postulat adalah sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh penyelidik”.

Adapun anggapan dasar dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepemimpinan kepala sekolah merupakan proses interaksi antara pemimpin, yang dipimpin, situasi sekolah dan lingkungan masyarakat.
2. Partisipasi masyarakat merupakan segala bentuk dukungan dari masyarakat yang dapat menunjang penyelenggaraan pendidikan karena pada dasarnya masyarakat merupakan produsen sekaligus konsumen pendidikan sehingga diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif di dalam setiap kegiatan yang ada di sekolah
3. Kondisi lingkungan masyarakat yang terpencil/tertinggal merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh kepala sekolah hal ini dikarenakan masyarakatnya mayoritas masih awam dalam hal pendidikan dan memegang teguh adat istiadat sehingga sulit untuk menerima perubahan dari luar.

E. Definisi Operasional

Moh. Nazir (1999: 141) mengemukakan bahwa "definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasi kegiatan ataupun memberikan suatu operasional."

Definisi operasional merupakan uraian yang menjembatani antara konsep dari suatu variabel dengan langkah instrumen. Pada langkah ini, peneliti mulai menjabarkan variabel yang akan diteliti dalam bentuk uraian tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan variabel yang akan diteliti.

Sesuai pendapat di atas, maka berikut adalah penjelasan beberapa istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Konsep Kepemimpinan

Pada umumnya kepemimpinan didefinisikan sebagai suatu proses mempengaruhi aktivitas dari individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Kepemimpinan kepala sekolah adalah proses pencapaian fungsi untuk mempengaruhi kegiatan bawahannya baik seorang ataupun kelompok dalam situasi tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Kepemimpinan akan melekat pada diri pemimpin dalam wujud kepribadian (*personality*), kemampuan (*ability*), dan kesanggupan (*capability*).

2. Konsep Kepala Sekolah

Pengertian kepala sekolah dari asal katanya yakni, “kepala” dan “sekolah”. Kepala diartikan sebagai ketua atau pimpinan suatu organisasi, sedangkan sekolah dapat diartikan sebagai organisasi atau lembaga di mana dilaksanakan Proses Belajar Mengajar (PBM). Wahjusumidjo (1999 : 83) mendefinisikan kepala sekolah sebagai berikut :

Seorang tenaga fungsional yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar (PBM), atau tempat berinteraksinya antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran

Konsep kepala sekolah yang berkaitan dalam penelitian ini diartikan, Sebagai seseorang yang memimpin sebuah sekolah dengan tugas sebagai administrator, manajer, dan supervisor di sekolah serta menjadi seseorang yang menjadi panutan dan suri tauladan bagi masyarakat di lingkungan

sekitarnya serta seseorang yang ahli dalam segala hal termasuk tentang kemasyarakatan

3. Konsep Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan suatu dukungan dari masyarakat baik berupa dana/materi, saran, usul, ide, atau gagasan, dan tenaga serta perhatian atau kepedulian masyarakat terhadap suatu hal yang berdampak positif.

Dalam penelitian ini yang dimaksudkan dengan partisipasi masyarakat adalah sumbangan masyarakat kepada sekolah yang kebanyakan berupa hasil bumi seperti buah-buahan, kacang-kacangan, dan beras serta berupa bantuan tenaga. Sebagian kecil berupa bantuan sarana dan prasarana seperti bangku dan meja, serta yang jarang terjadi adalah bantuan atau sumbangan berupa saran/ide yang menyangkut jalannya sistem pendidikan di sekolah dikarenakan masyarakat belum begitu paham akan arti pentingnya pendidikan.

4. Konsep Desa Tertinggal/Terpencil

a. Desa tertinggal adalah desa yang kondisi infrastrukturnya sangat minim dengan jumlah lapangan kerja dan berbagai fasilitas penunjang lainnya sangat kurang, antara lain sarana pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik dan ketersediaan BBM yang bila terus berlanjut akan menjadi masalah yang serius dan bisa menyebabkan terjadinya kerawanan pangan dan air bersih.

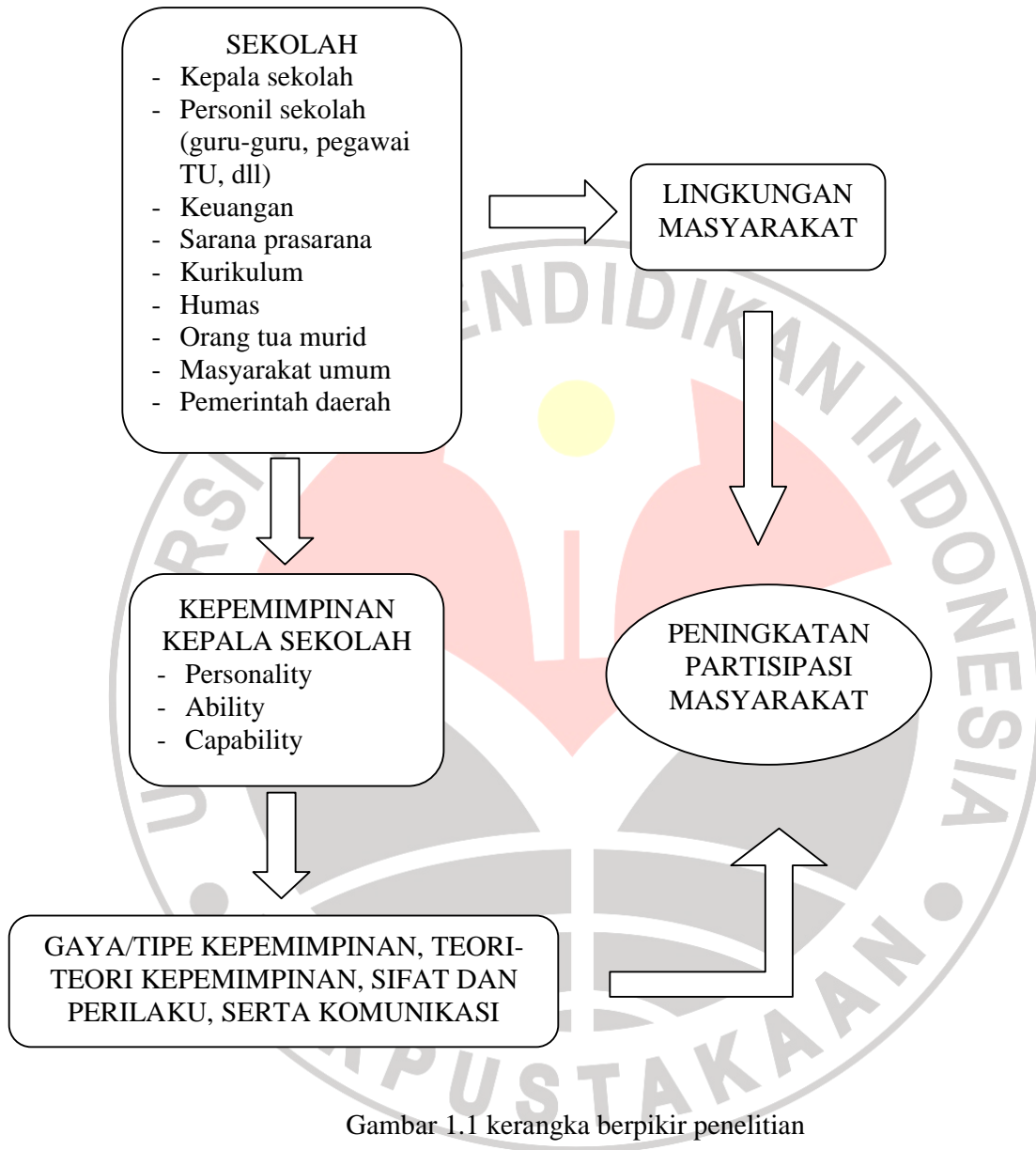
- b. Desa Terpencil adalah desa yang memiliki lokasi jauh di pedalaman, bersifat masyarakat tertutup dan kesulitan komunikasi bahasa.
- c. Desa terpencil/tertinggal adalah kawasan yang secara fisik terisolasi, kesulitan dalam akses ke kawasan lainnya, sebagian besar penduduknya adalah tertinggal baik dari segi sosial, ekonomi dan budaya, dan kondisi pelayanan kepada masyarakat masih sangat terbatas (belum banyak tersentuh oleh pemerintah dan nonpemerintah

Dalam penelitian ini desa terpencil adalah sebuah desa yang terletak diantara perbatasan kabupaten Serang dengan Kotamadya Cilegon sehingga masing-masing pemerintah daerah saling mengabaikan dan tidak peduli dengan situasi dan kondisi yang ada. Selain itu lokasinya terletak di daerah perbukitan akses jalannya pun sulit untuk dijangkau, masyarakat yang pada umumnya masih primitif membuat kebudayaan dari luar sulit diterima.

F. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik analisis statistik yang digunakan.

Bertolak dari latar belakang, perumusan masalah dan tujuan penelitian penulis menggambarkan kerangka berpikir tersebut sehingga menjadi panduan berpikir bagi peneliti. Maka dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Keterangan Kerangka Berpikir :

Sekolah merupakan sebuah lembaga pendidikan yang terdiri dari beberapa aspek dan salah satunya berhubungan dengan masyarakat yakni mengenai input yang sangat dibutuhkan dari masyarakat yaitu peserta didik, selain itu yang paling penting sekolah berdiri ditengah-tengah masyarakat sehingga dituntut untuk dapat memenuhi harapan masyarakat tentang kebutuhannya di dalam pendidikan. Maka dari itu dibutuhkan seorang kepala sekolah yang cakap dalam berbagai hal termasuk kemampuannya dalam berinteraksi dengan masyarakat di lingkungan sekolah, khususnya orang tua peserta didik. Dengan berbagai kemampuan yang dimiliki oleh kepala sekolah tersebut secara tidak langsung sekolah akan memperoleh perkembangan yang pesat baik dari segi pembelajarannya maupun manajemennya. Kepala sekolah dengan kepemimpinannya dapat melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pendekatan-pendekatan terhadap orang-orang yang berpengaruh di lingkungan masyarakat, atau dengan jalan melibatkan langsung dalam berbagai kegiatan sekolah misalnya mengundang dalam acara pembagian raport, dan tetap menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat, serta memberikan penyuluhan kepada para penduduk akan arti pentingnya pendidikan pada masa sekarang dan akan datang.